

SIARAN PERS AMNESTY INTERNATIONAL

Waktu Embargo 2300 GMT 26 August 2009

Timor-Leste: Sepuluh tahun setelah referendum, masih belum ada keadilan

Dewan Keamanan PBB seharusnya mendirikan tribunal pengadilan internasional atas semua pelanggaran HAM berat pada waktu referendum kemerdekaan Timor-Leste 1999 dan pendudukan Indonesia selama 24 tahun, tulis Amnesty International dalam sebuah laporan yang diumumkan hari ini dalam rangka ulang tahun referendum ke-10.

Sepuluh tahun setelah Timor-Leste memilih kemerdekaan, masyarakatnya masih dihantui oleh budaya impunitas.

Laporan Amnesty International berjudul "Kami meminta keadilan, selama 10 tahun masih ada impunitas di Timor-Leste", berdasarkan misi ke Timor-Leste pada bulan Juni dan menggambarkan bagaimana kebanyakan pelaku kejahatan antara 1975 dan 1999, termasuk yang memegang komando waktu itu, masih belum diajukan ke pengadilan yang kredibel, independen dan adil, baik di Indonesia maupun di Timor-Leste.

"Walaupun segala inisiatif keadilan nasional dan internasional, masyarakat Timor-Leste tetap belum memperoleh keadilan dan ganti rugi (reparasi). Militer Indonesia dan milisia anti-kemerdekaan membunuh lebih dari seribu orang Timor-Leste di depan mata dunia, tetapi masih belum ada pertanggung jawaban yang semestinya atas kekejaman ini," kata Donna Guest, wakil direktur Amnesty International Asia Pasifik.

"Korban Timor-Leste kecewa, mereka telah memberi kesaksian berberapa kali kepada berbagai pihak, tapi mereka tetap belum melihat tanda-tanda pertanggungjawaban yang signifikan," kata Donna Guest.

Beberapa pelaku kecil telah divonis, tetapi jumlah ini masih terlalu kecil dan tersangka pelanggaran HAM masih banyak di Indonesia.

Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia memilih untuk tidak menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat di Timor-Leste, dengan menjalankan prakarsa seperti kerjasama pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, dengan menggelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada 2005 yang tidak berwenang mendakwa pelaku tindak kejahatan.

"Jalan yang diambil oleh kedua pemerintah ini melemahkan badan hukum di kedua negara," kata Donna Guest. "Korban-korban menuntut agar pemerintah Indonesia dan Timor-Leste dan PBB wajib menyelidik segala tuduhan dan menegakkan keadilan secara bertanggung jawab untuk kasus-kasus pelanggaran HAM antara 1975 dan 1999."

Dewan Keamanan PBB, yang sebelumnya sangat vokal demi keadilan untuk korban kekerasan 1999, kini gagal untuk mengikuti kewajiban kepada masyarakat Timor-Leste. Amnesty International mendesak Dewan Keamanan PBB agar menyusun sebuah rancangan komprehensif

berjangka panjang untuk mengakhiri impunitas atas tindak kejahatan tersebut, termasuk menyelenggarakan suatu tribunal pengadilan internasional dengan yurisdiksi yang meliputi semua kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste semasa pendudukan Indonesia antara 1975-1999.

Latar belakang

Pada 30 Agustus 1999, mayoritas masyarakat Timor-Leste memilih kemerdekaan. Paling sedikit 1,200 orang tewas dalam persiapan pol dan setelah referendurnya karena kejahatan dan penggalan HAM oleh milisi pro-Indonesia. Pelanggarannya termasuk pembunuhan, penculikan, kekerasan seksual, penangkapan sembarangan, ancaman dan intimidasi orang Timor-Leste. Semua kekerasan ini telah didokumentasi oleh organisasi HAM dan institusi pakar khususnya dalam 'Chega!', laporan berjumlah 2,800 halaman oleh Komisi Penerima, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor- Leste (CAVR).

Prakarsa hukum yang pernah dilakukan sejak 1999 adalah Pengadilan HAM Ad-Hoc Timor-Timur yang dilakukan oleh Indonesia dan Panel Khusus PBB untuk Timor-Leste (the UN Special Panels). Ke-18 terdakwa yang pernah diadili oleh pengadilan HAM Ad-Hoc tersebut atas tindak kejahatan di Timor-Leste pada 1999 semuanya dibebaskan dari dakwaan. Proses peradilan ini dikritik sebagai sangat menyimpang. Di Timor-Leste hanya ada satu orang terhukum oleh Panel Khusus PBB yang masih menjalani hukuman di penjara.

Akhir kata

Untuk informasi lanjut hubungi kantor media Amnesty International di London, UK, di nomor +44 20 7413 5566 atau email: press@amnesty.org

Di Perancis: Isabelle Arradon: +33 2 9744 0647

Di Australia: Jessica Baird: +61 2 8396 7622

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
www.amnesty.org